



# DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP KINERJA SEKTOR MANUFAKTUR DAN DITINJAU SECARA SYARIAH

Dian Zahra Syahfitri Lubis<sup>1</sup>, Fathiya Syahidah Nasution<sup>2</sup>, Maulida Rahma<sup>3</sup>, Maryam Batubara<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[dianzahralubis@gmail.com](mailto:dianzahralubis@gmail.com)<sup>1</sup>, [fathiyasyhdh26@gmail.com](mailto:fathiyasyhdh26@gmail.com)<sup>2</sup>, [maulidarahma474@gmail.com](mailto:maulidarahma474@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[maryam.batubara@uinsu.ac.id](mailto:maryam.batubara@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral yang dapat mempengaruhi variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk melindungi nilai uang dari ancaman eksternal dan internal dengan tetap menjaga stabilitasnya. Kebijakan moneter ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor manufaktur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dalam mengumpulkan data. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang menentukan tingkat suku bunga dalam suatu negara, pada sektor manufaktur hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan industri jika dibarengi dengan pembatasan yang dapat menghambat perusahaan. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, ekonomi syariah tidak memiliki peraturan atau penentuan mengenai suku bunga, penggunaan kebijakan moneter pada perusahaan manufaktur tentu tidak berkelanjutan jika perusahaan tersebut merupakan produsen syariah. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi sektor manufaktur, seperti pengendalian inflasi dan suku bunga sehingga memberikan dampak positif terhadap kebijakan. Dalam konteks moneter ini, kebijakan moneter harus ditangani secara hati-hati dalam konteks ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan berdampak baik terutama dalam hal pengelolaan suku bunga dan inflasi. Di Indonesia, sektor industri memegang peranan penting dalam mendorong ekspansi perekonomian.

**Kata Kunci:** Manufaktur, Kebijakan Moneter, Syariah.

## Abstract

Monetary policy is a tool used by central banks that can influence financial variables such as interest rates and the amount of money in circulation. The goal is to protect the value of money from external and internal threats while maintaining its stability. This monetary policy has a big influence on various sectors, one of which is the manufacturing sector. The method used is qualitative research. By using library research in collecting data. The Monetary policy is a policy that determines interest rates in a country, in the manufacturing sector, this is of course very influential for industrial progress if accompanied by restrictions that can hinder company. If viewed from an Islamic perspective, sharia economics has no regulations or determination regarding interest rates, the use of monetary policy in manufacturing companies is certainly not sustainable if the company is a sharia manufacturer. Monetary policy can influence the manufacturing sector, such as controlling inflation and interest rates to form a positive impact on policy. In this monetary context, monetary policy must be handled carefully in the context of Sharia economics so that it is in accordance with Sharia principles and has a good impact, especially in terms of managing interest rates and inflation. In Indonesia, the industrial

sector plays an important role in driving economic expansion.

**Keywords:** Manufacture, Monetary Policy, Sharia.

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan negara yang masih dalam tahap bergerak mendapatkan kemajuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Perekonomian di Indonesia masih dikatakan belum stabil mengingat masih banyak masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistika 2023, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta orang pada Maret 2023, turun 0,46 juta orang dari September 2022 dan 0,26 juta orang dari Maret 2022 (BPS, 2023b). Meski mengalami penurunan beberapa persen, tapi tetap saja bahwa kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukan adanya perbaikan-perbaikan khususnya di sektor perekonomian (Listri et al., 2019).

Dalam upaya meningkatkan perekonomian negara, salah satunya adalah dengan cara menstabilkan nilai mata uang. Uang membantu masyarakat (dalam hal ini masyarakat Indonesia) mengatasi hambatan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sebagai alat perdagangan, investasi, konsumsi, dan menabung, karena perannya sebagai alat transaksi, satuan hitung, dan penyimpan nilai (Khair, 2008). Pemerintah harus mampu menjaga nilai mata uang, tidak meredarkan uang dengan jumlah banyak agar tidak terjadi inflasi dan mengakibatkan kerugian pada negara. Peredaran uang dalam jumlah massif sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, semakin lemah mata uangnya, semakin tinggi tingkat inflasinya, upaya-upaya pengendalian uang inilah yang disebut dengan kebijakan moneter (Mayuni & Suarjaya, 2018).

Kebijakan moneter merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral yang bisa memengaruhi variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk melindungi nilai uang dari ancaman eksternal dan internal sambil menjaga stabilitasnya (*Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia - Perry Warjiyo - Google Buku*, n.d.). Menjaga kestabilan nilai mata uang sangat penting bagi sebuah negara, menjaga mata uang negara sama dengan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, dengan menjaga perekonomian suatu negara, maka dipastikan rakyat dalam negara tersebut tidak akan hidup dalam belenggu kemiskinan, sehingga masyarakat bisa terbebas dari jerat miskin tersebut (Triwahyuni, 2021). Oleh karenanya, sangat diperlukan kebijakan moneter untuk mengatur hal-hal fiscal dalam perekonomian negara, sehingga kesejahteraan negara tetap terjaga.

Adapun kebijakan moneter ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor manufaktur. Krisis ekonomi 1997-1998 menunjukkan bagaimana sektor manufaktur telah tumbuh secara tidak sehat di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang positif dalam hal produksi, manufaktur ini tetap sangat bergantung pada impor, terutama untuk barang modal dan bahan baku olahan (Aji, 2019). Adapun perkembangan ekspor di Indonesia sampai dengan saat ini dinilai masih kurang cukup baik, meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pelarangan mengekspor barang mentah dan berbagai lainnya, tetap saja belum menjadikan Indonesia yang kaya akan SDA ini mampu menjadikannya raja dalam



sektor Industri (Dini Abdianti et al., 2023).

Adapun jika ditinjau secara syariah, segala bentuk pertukaran dalam konsepsi Islam harus setara, apalagi dinilai pertukaran mata uang. Ekonomi Islam mengharuskan kebijakan moneternya tidak mengandung unsur bunga bank dan riba. Islam melarang riba, termasuk bunga bank, menurut Al-Quran. Selain itu, manajemen moneter ekonomi Islam didasarkan pada pembagian keuntungan (Pembangunan et al., 2017). Sehingga jika ditinjau lebih jauh kebijakan moneter dalam ekonomi islam akan sulit mendapat keuntungan jika tidak melakukan program jangka panjang.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang yang beredar di masyarakat (*Perry Warjiyo, Solikin, n.d.*). Tujuan dari kebijakan moneter adalah agar pemerintah dapat mengontrol jumlah uang beredar untuk meningkatkan status ekonomi. Selain menata sektor riil dan menghilangkan berbagai mitos tentang uang, tindakan ini juga penting untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini. Jika dilihat lebih dekat, ada dua alasan utama dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara-negara lain di dunia, dan semuanya berhubungan dengan masalah uang (Purwanto, 2017). Adapun dasar dari setiap rencana ekonomi makro yang sukses untuk memerangi inflasi di suatu negara adalah kebijakan moneternya. Otoritas moneter memiliki pengaruh yang signifikan, meskipun tidak langsung, terhadap nilai tukar dan tingkat harga di suatu negara. Otoritas moneter memiliki wewenang untuk mengatur jumlah uang beredar, mempengaruhi suku bunga, aliran kredit, dan pertumbuhan sektor keuangan ekonomi (Ahwal et al., 2021).

### **2.2 Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi yang didasarkan pada hukum islam dikenal sebagai ekonomi syariah. Sejarah ekonomi syariah ini diambil dari etika Nabi Muhammad SAW ketika beliau mulai berdagang, beliau berusia antara 16 dan 17 tahun. Inilah awal mula ekonomi syariah muncul. Pada saat itu, Rasulullah SAW melakukan bisnis dengan menggunakan metode murabahah, yaitu jual beli yang marginnya bisa dinegosiasikan dan harga pokoknya sudah diketahui. Karena tantangan ekonomi yang dihadapi Abu Thalib pada saat itu, Rasulullah SAW mulai berdagang. Pada usia dua puluhan, Rasulullah SAW dan Khodijah mendirikan sebuah perusahaan kemitraan komersial yang dikenal dengan istilah bermusyarokah. Perusahaan Rasulullah SAW berkembang dengan cepat, sehingga memungkinkan beliau untuk memberikan mahar 100 ekor unta merah kepada Khodijah (Santi, 2019). Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang menyelidiki masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip Islam (Efendi & Bakhri, 2018).

Sehingga sesuai dengan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu sistem atau konsep dalam kehidupan berekonomi yang mengedepankan keislaman yang mana dalam sistem ini, tidak mengenal unsur riba.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya. Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan (Darmalaksana, 2020). Metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif dilakukan dalam penelitian ini karena peneliti menjadi instrument utama dalam penelitian, yang mana peneliti menjadi orang yang mengatur jalannya penelitian (Prof.Dr.Sugiyono, 2020). Adapun digunakan pendekatan studi pustaka karena peneliti mendapatkan sumber-sumber data dari berbagai kajian literatur seperti jurnal-jurnal terdahulu, buku, dan juga website.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Manufaktur

Berdasarkan data badan pusat statistika, sampai dengan tahun 2023, data manufaktur di Indonesia yang sudah tercatat sebanyak 32.193 unit usaha atau menjadi sebuah Perusahaan dalam bahasan yang lebih tinggi (BPS, 2023a). Jika dibandingkan dengan jumlah emiten dengan sektor lain yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sektor perusahaan manufaktur memiliki jumlah emiten terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perdagangan di BEI sangat dipengaruhi oleh perusahaan manufaktur (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Sehingga sesuai dengan ini, dapat dikatakan bahwa sektor manufaktur ini memiliki pengaruh yang cukup kuat terkait dengan bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia. Adapun manufaktur ini bisa menjadi sumber utama pendapatan negara yang mana semakin besar Perusahaan manufaktur, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan dan diterima oleh negara (Siregar, 2016).

Di Indonesia, terdapat beberapa manufaktur syariah, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencantumkan sejumlah perusahaan industri yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Dengan semakin banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia, sektor manufaktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri (Maulita & Arifin, 2018).

#### B. Dampak Kebijakan Moneter

Dari jurnal yang dibuat Aji (2019) terdapat berbagai dampak kebijakan moneter terhadap sektor manufaktur di Indonesia. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa kebijakan moneter jika digunakan dalam jangka panjang, maka akan berpengaruh pada inflasi. Jika digunakan dalam jangka pendek maka dapat mendorong perekonomian, pun jika digunakan kebijakan moneter kontraktif dapat menekan lajunya inflasi.

Adapula dampak lainnya kebijakan moneter bagi sektor manufaktur jika ditinjau secara umum yaitu menunjukkan bahwa perubahan PDB, investasi, konsumsi, dan tingkat pengembalian modal semuanya dipengaruhi secara positif oleh kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Perubahan suku bunga, yang merupakan cerminan dari kebijakan moneter, hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap industri di Indonesia (Aji, 2019).

### **C. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Moneter Terhadap Kinerja Sektor Manufaktur**

Adapun dalam menanggulangi moneter ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi agar kebijakan moneter tidak memberikan dampak buruk pada manufaktur, meskipun terkadang kebijakan moneter membawa dampak negative, tapi pemerintah tetap melakukan berbagai upaya agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyebabkan sektor manufaktur merugi apalagi sampai gulung tikar.

#### **1. Memberikan Kebijakan Fiskal**

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah kebijakan moneter ini merugikan sektor industry adalah dengan memberikan kebijakan fiskal yang mana pengurangan pajak yang dibebankan pada Perusahaan industry. Pemerintah dapat menstimulasi permintaan domestik, terutama permintaan untuk barang-barang manufaktur, dengan menerapkan kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak atau pengeluaran publik yang lebih besar. Produktivitas sektor manufaktur juga dapat ditingkatkan dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terlibat dalam infrastruktur, pelatihan pekerja, atau penelitian dan pengembangan (Nuzulia, 1967).

#### **2. Memperkuat Nilai Mata Uang**

Selain dapat memberikan kebijakan fiskal, pemerintah juga bisa mengupayakan peningkatan nilai mata uang untuk memberikan keuntungan kepada Perusahaan manufaktur. Memperkuat nilai mata uang ini mampu meningkatkan nilai ekspor sehingga mampu memberikan keuntungan pada Perusahaan industri. Adapun jika mata uang negara lemah, maka hal ini akan berdampak pada kurangnya keuntungan dan bisa saja Perusahaan manufaktur merugi, apalagi ditambah dengan hasil industry yang tidak bernilai jual (Salim, 2017).

#### **3. Dampak Kebijakan Manufaktur Ditinjau Secara Syariah**

##### **a. Mempengaruhi Suku Bunga**

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang menetapkan suku bunga di suatu negara, dalam sektor manufaktur, kebijakan moneter ini tentu sangat berpengaruh untuk kemajuan Perusahaan industri jika dibarengi dengan batasan-batasan yang dapat menghambat laju Perusahaan. Adapun jika dilihat secara islam, ekonomi syariah tidak ada peraturan atau penetapan tentang suku bunga, sehingga antara kebijakan moneter dengan ekonomi syariah tentu bertolak belakang, sehingga jika ditinjau kembali, penggunaan kebijakan moneter dalam Perusahaan manufaktur tentu tidak berkesinambungan jika Perusahaan tersebut merupakan manufaktur syariah (Rahayu, 2019). Adapun pengkajian lebih dalam bahwa kebijakan moneter memiliki dampak yang riskan terhadap sektor manufaktur jika ditinjau secara syariah, hal ini karena peraturan yang bertolak belakang tersebut. Suku bunga ketika dipandang dalam sudut pandang islam akan menjadi riba yang mana pada hakekatnya riba sangat dilarang dalam agama islam. Oleh karenanya, jika dilihat secara syariah, kebijakan moneter terhadap sektor manufaktur ini akan mengganggu jalannya suku bunga pada Perusahaan sehingga dapat mengakibatkan Perusahaan mendapatkan sedikit keuntungan

(Maronrong & Nugrhoho, 2019).

b. Terjadinya Gejolak Ekonomi Secara Makro

Makro ekonomi merupakan ekonomi secara luas dan menyeluruh. Kebijakan moneter terhadap sektor manufaktur berdampak pada terjadinya gejolak makroekonomi, yaitu gejolak secara besar-besaran terhadap ekonomi dalam suatu negara. Faktor-faktor makroekonomi lainnya yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter adalah termasuk stabilitas pasar, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, jika membentuk kebijakan moneter dengan sudut pandang syariah dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi makro. Ekonomi syariah mampu menciptakan iklim ekonomi yang adil dan berjangka panjang yang menguntungkan semua pemangku kepentingan, terutama industri manufaktur (Dwipartha, 2012).

c. Inflasi

Kebijakan moneter yang mengatur tentang suku bunga tentu erat kaitannya dengan inflasi. Adapun kebijakan moneter ini mampu memangkas lajunya inflasi, bisa juga meningkatkan inflasi (Nursalim et al., 2021). Jika dipandang dalam sudut pandang syariah, kebijakan moneter ini merupakan suatu peraturan yang merugikan bangsa dan negara, karena syariah menekankan pada pengendalian harga, sehingga kebijakan moneter bisa menjadi permasalahan fiskal bagi sektor manufaktur apalagi tanpa adanya batasan atau pengereman dari pemerintahan, oleh karena hal ini bisa menyebabkan lajunya inflasi semakin tinggi.

## 5. Simpulan Dan Saran

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi Sektor manufaktur seperti halnya pada pengendalian inflasi dan suku bunga. Adapun untuk membentuk dampak positif pada kebijakan moneter ini, kebijakan moneter harus ditangani dengan hati-hati dalam konteks ekonomi Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan membawa dampak baik pada pelaku sektor industri, terutama dalam hal mengelola suku bunga dan inflasi. Di Indonesia, sektor industri memainkan peran penting dalam mendorong ekspansi ekonomi. Namun, isu-isu seperti ketergantungan pada impor dan rendahnya ekspor masih perlu diselesaikan. Kesempatan untuk membangun lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat muncul dari penerapan konsep-konsep ekonomi Syariah di sektor industri. Hal ini karena peraturan-peraturan syariah cukup berbeda dengan peraturan konvensional, dan dikatakan bahwa peraturan syariah ini mampu memberikan batasan-batasan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian, khususnya pada pelaku industry.

## 6. Daftar Pustaka

- Ahwal, H., Danur, D. N., & Airlangga, U. (2021). The impact of monetary policy on industrial product : evidence from indonesia. *Journal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 355–364.
- Aji, A. P. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia. *Umsida*.
- Al-assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980.



- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2010.
- BPS. (2023a). *Direktori Industri Manufaktur Indonesia 2023*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/29/8c2d8435fe0c552c6ffdc528/direktori-industri-manufaktur-indonesia-2023.html>
- BPS. (2023b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, & Sholahuddin Al Ayyubi. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 106–120. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>
- Dwipartha, N. M. W. (2012). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *E Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 226–248.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111–135. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)
- Kebijakan Moneter di Indonesia - Perry Warjiyo, Solikin - Google Buku*. (n.d.). Retrieved May 5, 2024, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y5rWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kebijakan+moneter&ots=E-r5jd\\_z00&sig=DL0BoPO0aHE24w5-q0FzN3UP6AA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Kebijakan+moneter&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y5rWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kebijakan+moneter&ots=E-r5jd_z00&sig=DL0BoPO0aHE24w5-q0FzN3UP6AA&redir_esc=y#v=onepage&q=Kebijakan+moneter&f=false)
- Khair, K. A. B. M. A. (2008). *KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM ANALISIS KEBIJAKAN MAHATHIR MOHAMAD DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI MALAYSIA TAHUN 1997-1998*. 3(2), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Listri, D., 1□, P., & Khoirudin, R. (2019). Penyerapan tenaga kerja sector industry manufaktur di Jawa Tengah 2011-2015. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 41–52. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Maronrong, R. M., & Nugrhoho, K. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Otomotif Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2017. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(02), 277–295. <https://doi.org/10.36406/jemi.v26i02.38>
- Maulita, D., & Arifin, M. (2018). Pengaruh Return On Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham Syariah. *Jurnal Manajemen*, 8(1), 10–19. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JM/article/view/659>
- Mayuni, I. A. I., & Suarjaya, G. (2018). Pengaruh ROA, Firm Size, EPS, dan PER Terhadap Return Saham Pada Sektor Manufaktur di BEI. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(8), 4063–4093.
- Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia - Perry Warjiyo - Google Buku*. (n.d.). Retrieved May 5, 2024, from



[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U6HWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&q=Kebijakan+moneter&ots=7vDpDuvHSI&sig=CLxzcZQWZk9v1XoHnbzb0jJQ2Tg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Kebijakan moneter&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U6HWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&q=Kebijakan+moneter&ots=7vDpDuvHSI&sig=CLxzcZQWZk9v1XoHnbzb0jJQ2Tg&redir_esc=y#v=onepage&q=Kebijakan moneter&f=false)

- Mulyani, S., Darminto, dan M.G. Endang. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek tahun 2008-2012). *Jurnal perpajakan* 2(1).
- Nursalim, A. B., Rate, P. V, & Baramuli, D. N. (2021). Pengaruh Inflasi, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Ratio Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur Periode 2015-2018. *Jurnal EMBA, Vol.9 No.4(9)*, 1–13.
- Nuzulia, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Pembangunan, P. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2017). Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia Irma Mar'atus Sholihah; Syaparuddin; Nurhayani \*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(1), 2085–1960.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March, pp. 54–68). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Rahayu, T. N. (2019). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 35–46. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i2.166>
- Salim, J. F. (2017). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2000: 1–2010: 12. *E-Kombis*, III(2), 68–76. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23508%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/23508/NTA2OTM=/Pengaruh-Kebijakan-Moneter-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-Di-Indonesia-Periode-Tahun-20001-201012-Ratih-Dian-Yuniarti--F0107107.pdf>
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 47–56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Sukirno, Sadono. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 15–26. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26>



